



PROBLEMATIKA KELAS MENENGAH INDONESIA: DARI AGEN PERUBAHAN MENUJU PASIVITAS POLITIK

M Yahya Wahyudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mochyahyawahyudin@gmail.com

Received 13-02-2026 | Revised 13-03-2026 | Accepted 30-04-2026

ABSTRACT

This study examines the problematic condition of Indonesia's middle class, which has undergone a transformation from an agent of socio-political change into a group that tends toward political passivity. The middle class, which historically played a role as a catalyst for change as evidenced in the 1998 reform movement and the national movement during the colonial era now faces a paradox: possessing substantial social capital, yet trapped in political apathy. This study aims to analyze the structural factors driving the political passivity of Indonesia's middle class within the context of global capitalism and post-reform political dynamics. The method employed is a qualitative approach through literature analysis. Data were drawn from books, scientific journals, research reports, and relevant articles related to the middle class, social change, and political passivity. The primary analytical framework used is Antonio Gramsci's theory of hegemony to dissect the mechanisms by which capitalism dominates middle-class consciousness. The findings reveal that the political passivity of Indonesia's middle class is a product of capitalist hegemony operating through three main channels: (1) a consumer culture that replaces solidarity-based social identity with consumption-based identity; (2) an education system oriented toward producing a capitalist workforce rather than critically engaged citizens; and (3) identity-based political populism that steers the middle class toward pragmatic support for the status quo. This phenomenon is exacerbated by the weakening role of organic intellectuals as a bridge between the middle class and collective consciousness. This study concludes that the revival of the middle class as an agent of change requires critical education, alternative political narratives, and the strengthening of social solidarity as a counter-hegemony against the dominance of global capitalism.

Kata Kunci: Middle Class, Political Passivity, Hegemony, Capitalism, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika kelas menengah Indonesia yang mengalami transformasi dari agen perubahan sosial-politik menjadi kelompok yang cenderung pasif secara politik. Kelas menengah, yang secara historis berperan sebagai katalisator perubahan—sebagaimana tampak dalam gerakan reformasi 1998 dan pergerakan nasional era kolonial—kini menghadapi paradoks: memiliki modal sosial yang besar, namun terjebak dalam apatisme politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang mendorong pasivitas politik kelas menengah Indonesia dalam konteks kapitalisme global dan dinamika politik pasca-reformasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur. Data bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel relevan yang berkaitan dengan kelas menengah, perubahan sosial, dan pasivitas politik. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori hegemoni Antonio Gramsci untuk membedah mekanisme dominasi kapitalisme terhadap kesadaran kelas menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasivitas politik kelas menengah Indonesia merupakan produk dari hegemoni kapitalisme yang bekerja melalui tiga jalur utama: (1) budaya konsumerisme yang menggantikan identitas sosial berbasis solidaritas dengan identitas berbasis pola konsumsi; (2) sistem pendidikan yang diorientasikan untuk mencetak tenaga kerja

kapitalisme ketimbang warga negara yang kritis; dan (3) populisme politik berbasis identitas yang menggiring kelas menengah pada dukungan pragmatis terhadap status quo. Fenomena ini diperparah oleh melemahnya peran intelektual organik sebagai penghubung antara kelas menengah dan kesadaran kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebangkitan kelas menengah sebagai agen perubahan memerlukan pendidikan kritis, narasi politik alternatif, dan penguatan solidaritas sosial sebagai kontra-hegemoni terhadap dominasi kapitalisme global.

Keywords: Kelas Menengah, Pasivitas Politik, Hegemoni, Kapitalisme, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Wacana kelas menengah, merupakan wacana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan utama dalam berbagai media di tanah air. Tidak heran, apabila kelas menengah menjadi aktor utama dalam perpentasan roda ekonomi-politik; kelas menengah adalah basis yang sangat potensial bahkan terlalu dominan untuk menentukan nasib Indonesia kedepan. Hal ini, didasarkan pada posisi kelas menengah yang dapat menyentuh dialektika kelas secara langsung sekaligus secara bersamaan; pada lingkup ruang yang sama dan waktu yang sama (Politik Jurnal Politik and Raharjo Jati 2016). Semisal untuk kepentingan penelitian, seorang dosen memiliki akses langsung terhadap pejabat tinggi struktural dunia kampus, sekaligus memiliki akses untuk menyentuh masyarakat bawah. Maka dari itu, posisi kelas menengah selalu dihadapkan pada posisi yang ambigu secara politik, Ia memiliki potensi untuk mempertahankan struktur, sekaligus ia memiliki potensi untuk menjungkir-balikkan struktur. Akan tetapi, status kelas menengah sebagai aktor sentral yang menentukan arah gerak ekonomi-politik, merupakan pernyataan yang tidak ambigu dan menjadi premis utama dalam penelitian ini.

Kelas menengah, tidak mungkin tergeletak begitu saja — secara netral dan suci — di tengah-tengah masyarakat. Kelas menengah sudah ada di dalam masyarakat, bahkan ikut membentuk apa-apa tentang identitas kemasyarakatan tersebut. Artinya, kelas menengah harus dilihat sebagai entitas yang selalu bergerak dalam ruang dan waktu; ikut dibentuk sekaligus membentuk elemen masyarakat dalam proses kementerian yang tidak terelakkan. Dalam kasus ini, tidak bisa kita tinggalkan persoalan ekonomi-politik, sebagai salah satu variabel yang membentuk kelas menengah secara historis; tidak mengherankan jika pada nantinya, terdapat satu atau beberapa perbedaan signifikan kelas menengah pada era tertentu dan kelas menengah pada era yang lain; sebut saja kelas menengah pada era: Kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru dan Pasca-Reformasi.

Untuk itu, penulis memosisikan kelas menengah dalam penelitian ini sebagai sesuatu yang potensial dalam membentuk perubahan radikal secara ekonomi-politik, sekaligus sesuatu yang strategis dalam dijadikan *pion* utama untuk mempertahankan status quo. Sehingga, kelas menengah tidak dipandang secara definitif dan normatif, melainkan dipandang sebagai subjek dari sejarah sekaligus objek sejarah; yang tidak dipisahkan dari kepentingan ekonomi-politik tentunya.

Mengapa harus ekonomi-politik? Sebagaimana yang akan penulis jelaskan nantinya, ekonomi-politik merupakan variabel awal yang menempatkan individu sebagai *objek* dari individu lain sebagai *subjek*. Hal itu, disebabkan karena manusia perlu untuk bekerja dalam menghidupi dirinya, sebab tidak mungkin menerima bantuan dari orang lain selama hidupnya (Cuk and Wijaya, n.d.). Maksudnya, intervensi individu atas individu lain untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan baik, namun memiliki status yang terlegitimasi. Untuk memahami ini, kita perlu untuk membayangkan bahwa terdapat individu yang unggul, yang dapat menguasai individu lain, baik menguasai masa depannya atau menguasai keputusan hidupnya. Dalam artian, tidak mungkin jika ada penguasaan terhadap satu individu ke individu lain jika tidak melalui ekonomi-politik, serta penguasaan tersebut akan menciptakan *kesadaran* baru terhadap individu yang dikuasainya. Dengan begitu, kemengan kapitalisme dalam memberikan pengaruhnya adalah ketika ia berhasil menentukan pola politik yang semata-mata untuk mempertahankan kekuasaannya; membuat kapitalisme *menggurita* dalam jejaring aspek-aspek strategis yang berhubungan dengan kesadaran manusia. Sehingga, tidak mengherankan jika pada nantinya kita akan melihat bahwa rezim kapitalisme bukan semata-mata sistem ekonomi, melainkan koneksitas antara institusi politik, institusi komunikasi, institusi sosial-budaya, intitusi pendidikan bahkan intitusi agama sekalipun.

Pengontrolan kapitalisme terhadap individu seperti yang dicontohkan dalam kasus sebelumnya, menjadikan suatu pembeda antara hegemoni tradisional dengan hegemoni modern. Sebagai mana yang kita ketahui, hegemoni tradisional yang dapat kita lihat dari era-era *pre-renaissance*; pengontrolan terhadap individu dilakukan oleh gereja melalui suatu terror penyiksaan atau eksekusi yang menghantui masyarakat. Penyiksaan atau eksekusi tersebut dilakukan terhadap seseorang yang dianggap keluar dari jalur norma yang ditetapkan gereja atau dianggap sebagai ancaman terhadap legitimasi gereja, sengaja kerap dilakukan di alun-alun kota dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum; bahwa gereja menanamkan doktrinnya secara koersif atau paksaan melalui pengontrolan rasa takut masyarakat eropa. Kini, praktik-praktik hegemoni telah berkembang menjadi lebih halus dan samar, bahkan normalisasi dan persetujuan masyarakat terhadap satu wacana sekalipun merupakan salah satu bentuk hegemoni (Fansuri 2017). Semisal bahwa normalisasi masyarakat terhadap kedudukan *mall* sebagai wujud kebahagiaan materil karena di dalamnya terdapat berbagai instrumen yang dapat

memuaskan manusia dari mulai perlengkapan dapur, alat-alat dan kendaraan, ragam jenis pakaian, buku dan perlengkapan sekolah, sampai alat *fitness* sekalipun semua tersedia.

Melihat posisi kelas menengah di kancah dunia perpolitikan Indonesia yang disandingkan dengan analisis Hegemoni milik Gramsci, memungkinkan kita untuk mengeksplorasi sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari; hegemoni ada dimana-mana. Barangkali menjadi tidak mengherankan akan penulis tunjukan nantinya bahwa banyak kampus di tanah air kini mewajibkan magang kerja sebagai salah satu syarat kelulusan atau beberapa kampus di tanah air memiliki kebijakan untuk dapat mengonversi mata kuliah menjadi magang kerja sama tidak mengherankannya apabila banyak para artis dan pebisnis yang mulai berkecimpung atau merapat dalam kontestasi politik, dengan narasi bahwa "Hak politik warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945". Untuk itu, kemana arah politik kelas menengah Indonesia sekarang merupakan persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berangkat dari premis bahwa kelas menengah merupakan modal besar yang dapat menggerakkan roda ekonomi-politik, menjadikan kelas menengah sebagai objek besar yang digunakan oleh rezim kapitalisme dalam mempertahankan status quo. Mengingat modalnya yang sangat besar, pertarungan "mengendalikan" kelas menengah merupakan pertarungan hidup dan mati yang akan mengubah peta ekonomi-politik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika transformasi kelas menengah Indonesia dari agen perubahan sosial-politik menjadi kelompok yang cenderung pasif secara politik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk buku dan jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang relevan dengan tema kelas menengah, perubahan sosial, serta pasivitas politik. Alasan menggunakan metode kualitatif, karena kepenulisan jurnal ini berupaya untuk mencari hubungan-genealogi yang memungkinkan kelas menengah cenderung menjadi pasif dalam kancah politik; literatur berupaya untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya guna mendukung argument-argumen yang akan disajikan di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kelas Menengah dan Dunia Perpolitikan

Masyarakat dapat dikategorikan menjadi elit dan rakyat. Lingkaran elit terdiri dari sejumlah individu yang lebih sedikit dibandingkan dengan massa. Selain dari dua

kelompok ini, terdapat kelompok ketiga yang menduduki posisi perantara antara kelompok-kelompok yang disebutkan sebelumnya. Demografi yang berada di antara elit dan massa disebut sebagai kelas menengah. Biasanya, jumlah mereka melebihi jumlah kaum elit tetapi tetap lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rakyat. Mengenai kelas menengah, Aristoteles berpendapat bahwa setiap negara terdiri dari tiga lapisan masyarakat: (a) kelas kaya, (b) kelas miskin, dan (c) kelas menengah yang terletak di antara kedua ekstrem tersebut (Namang, n.d.) Dia pun menegaskan bahwa pembentukan sebuah bangsa yang kuat memerlukan kelas menengah yang tangguh. Ini karena kelas menengah menempati posisi yang paling aman dalam masyarakat. Mereka tidak rentan terhadap rasa iri atau cenderung merusak elit kaya, dan tidak ada pembenaran bagi kaum miskin untuk merasakan iri atau melakukan kekerasan terhadap mereka. Akibatnya, Aristoteles menyatakan bahwa sistem politik yang optimal muncul dari kelas menengah.

Konsep kelas menengah muncul dan mendapatkan pengakuan di Eropa Barat sepanjang era sebelum dan sesudah Revolusi Industri. Pada awal Revolusi Industri, kelas menengah secara mempengaruhi lanskap ekonomi. Awalnya, dengan runtuhnya ekonomi feodal, kelas menengah terdiri dari individu-individu yang berfungsi sebagai perantara antara produsen bahan baku dan manajer mereka. Dalam konteks ini, perantara menduduki posisi yang sangat istimewa, yang kemudian berkembang menjadi demografi yang dikenal sebagai kelas menengah. Kelas menengah, karena posisinya yang relatif menguntungkan, akan berfungsi sebagai jembatan antara kelas atas (borjuasi) dan kelas pekerja. Nicos Poulantzas (1936) menegaskan bahwa kelas menengah bukanlah komponen dari mode produksi kapitalis. Mereka tetap berada dalam fase transisi dari metode produksi feodal ke mode produksi kapitalis, menunjukkan sentimen anti-kapitalis dan pandangan reformis, bercita-cita untuk partisipasi, mobilitas vertikal, dan mengungkapkan kekhawatiran mengenai proletarianisasi.

Kondisi kelas menengah acap kali terkait dengan kerangka ekonomi. Kendati demikian, seiring dengan perkembangan zaman, kelas ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bidang-bidang di luar domain ekonomi. Mereka memiliki kapasitas untuk menetapkan diri dan berfungsi sebagai pelopor reformasi di hampir semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, adalah tepat untuk menyatakan bahwa kelas menengah bertindak sebagai katalisator untuk transformasi dan pembaruan yang sangat vital. Sebagai katalis transformasi, mereka biasanya diatur dengan cara yang teratur dan disiplin—baik itu secara aturan tertulis ataupun tidak tertulis. Karena jika tidak demikian, tentu mereka akan menjadi sebuah gelombang besar yang menyapu ulang status quo dan sulit dijinakkan ulang seperti yang terjadi pada revolusi-revolusi besar.

Kemudian, keberadaan dan peran kelas menengah di negara-negara berkembang sering kali diperiksa dan diperdebatkan secara luas. Apakah konsep kelas menengah, yang berasal dari kondisi di Eropa Barat, dapat diterapkan pada negara-negara berkembang? Banyak ilmuwan ilmu sosial mempertanyakan relevansi konsep kelas menengah di negara-negara berkembang, yang sebagian besar meraih kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Pertama-tama, kelas menengah di Eropa Barat muncul bersamaan dengan Revolusi Industri, sebuah periode yang ditandai dengan ekspansi dan

evolusi kapitalisme. Pada saat yang sama, negara-negara di negara berkembang pun baru saja dibebaskan dari kekuasaan kolonial; berusaha untuk mengadaptasi konsep kebangkitan kelas menengah yang terlihat di Eropa Barat ke dalam budaya mereka sendiri. Negara-negara berkembang yang baru merdeka biasanya terlibat dalam upaya modernisasi untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara maju. Kelas menengah memainkan peran dalam membimbing dan mengawasi transisi dari sistem feodal ke masyarakat modern selama proses modernisasi sama halnya seperti yang terjadi di periode awal pergerakan pemuda Bangsa Indonesia.

Sayangnya, seperti yang biasanya terjadi di negara-negara berkembang, kelas menengah kekurangan kekuatan ekonomi sebagai modal untuk mendukung dan memperkuat keterlibatan politiknya. Di satu sisi, mereka terus-menerus didorong secara ekonomi; tetapi, pada akhirnya, kelompok ini harus menghadapi Kenyataan keterlibatan pemerintah dalam kerangka ekonomi. Intervensi negara terwujud melalui beberapa aturan dan proses birokrasi di sektor ekonomi yang menghambat peningkatan ekonomi kelas menengah. Hal ini menghalangi kelas menengah untuk maju dan mengambil peran sebagai dominator di arena politik. Tidak heran apabila pada akhirnya, banyak kelas menengah yang mendukung kelas atas atau elit untuk mempertahankan "status quo" daripada mewakili kepentingan rakyat, karena mereka cenderung berintegrasi ke dalam lingkaran elit untuk memperoleh kekuasaan (Haryanto 2017).

Kelas Menengah Sebagai Poros Pergolakan Politik

Sejarah telah banyak mengajarkan kita bahwa, tidak menutup kemungkinan apabila kelas menengah sendiri lah yang akan melakukan revolusi apabila negara tidak juga mengakomodasi adanya pembangunan ekonomi. Meminjam gagasan yang diutarakan oleh Barrington Moore (1913) yakni "*No bourgeoisies, no democracy*" sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa demokrasi ekonomi yang dibawa oleh pasar sendiri mampu untuk membangkitkan rasionalitas politik kelas menengah tersebut. Berbagai macam kasus bisa menjadikan contoh seperti halnya Kasus Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, dan lain sebagainya (Asiva Noor Rachmayani 2015).

Sebelum Revolusi Prancis, sebagian besar kaum borjuis di Prancis menghamburkan energi, keterampilan, dan pendapatan mereka pada kegiatan yang dianggap terhormat, aman, dan dapat diterima secara sosial, daripada pada usaha ekonomi. Pada abad ke-18, setelah periode evolusi yang panjang, kaum borjuis di Prancis mencapai kesadaran diri. Mereka mengenali perbedaan mereka dari kelas-kelas di sekitar mereka, yang bervariasi dalam mentalitas, perilaku, dan minat (Kuntowijoyo 2013). Borjuis sebagai kelas menengah menyadari identitas sejati mereka. Mereka mengakui perbedaan antara diri mereka dan kelompok sosial lainnya. Kaum borjuis memisahkan diri dari kaum bangsawan dan melihat ancaman terhadap kepentingan mereka. Revolusi Prancis dipicu tidak hanya oleh sistem feodal dalam masyarakat Prancis tetapi juga oleh berbagai faktor, termasuk kebangkitan Rasionalisme, pemikiran Pencerahan, munculnya Romantisisme, dampak Revolusi Amerika, pemerintahan

otokratis, dan adanya kekosongan kekuasaan. Ini adalah penyebab utama Revolusi Prancis. Penyebab spesifiknya adalah masalah keuangan negara (Soebantardjo, n.d., 8).

Menurut Dorling Kindersley, *“Revolusi Prancis merupakan pemberontakan berbagai kelas dalam masyarakat terhadap seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi ini dipicu oleh kesusahan yang berkepanjangan. Prancis menjadi sangat miskin akibat tiga perang besar sejak 1740. Kegagalan panen mengakibatkan harga bahan pangan meningkat drastis. Kekuasaan hanya berpusat pada istana Versailles dan segala bentuk kritik pada pemerintahan dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Kaum bangsawan berkuasa layaknya tuan tanah feodal yang memberikan utang berbunga tinggi. Dengan inspirasi pemikiran Abad Pencerahan, kaum berpendidikan kelas menengah mulai berpikir untuk mengubah status quo.”*

Sama halnya di revolusi Amerika, Selama masa pemerintahan Raja James di Inggris (1603-1625), pemerintah menganiaya kaum Puritan. Puritan adalah sebuah faksi dari Kekristenan Protestan yang berusaha untuk mereformasi dan menyederhanakan Gereja Anglikan. Tindakan mereka dianggap merugikan Gereja Inggris yang resmi. Selama masa pemerintahan Raja Charles (1625-1649), kaum Puritan di Inggris dianiaya karena diduga merongrong Gereja Anglikan dan mengancam otoritas. Akhirnya, mereka pindah ke Amerika untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang relatif makmur dari kelas menengah. Mereka tiba di Amerika, menyebarkan cita-cita moral yang patut dicontoh dan struktur yang baik. Kepergian mereka bukan karena masalah ekonomi di Inggris, karena mereka menganggap hidup di sana relatif memuaskan. Koloni Inggris di Amerika sering beroperasi sebagai perusahaan dagang yang mengirimkan sewa kepada Raja Inggris. Pemerintah Inggris mengelola koloni-koloni Amerika dengan menunjuk seorang wakil raja yang disebut sebagai gubernur jenderal. Tanggung jawabnya adalah pemerintahan, manajemen ekonomi, pengumpulan pajak, pemeliharaan keamanan, dan pemberantasan penyelundupan di dalam koloni (Mawaddah et al. 2024).

Di Indonesia, dalam kasus gerakan reformasi 1998, menunjukkan munculnya 'kelas menengah politik', yang terdiri dari individu perkotaan terdidik yang mendasarkan sikap politik mereka pada kritik. Kelas menengah politik berbeda dari konsep konvensional kelas menengah yang digunakan dalam ilmu sosial. Kelas menengah meningkatkan posisi tawarnya dengan negara melalui modal; kelas menengah politik meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya melalui intelektualisme dan organisasi politik. Mereka adalah individu yang memperkuat atau mengokohkan gerakan sosial selama reformasi 1998. Mereka memiliki kekuatan moral untuk membangun kerangka sosial atau narasi baru (Saefulloh Fatah 1998).

Seperti dalam contoh lain, pada era kolonial misalnya, kaum menengah dalam artian orang terpelajar mendorong buruh untuk menciptakan serikat buruh sebagai pembela hak atas kapitalisme. Selama periode tersebut, pekerja pribumi di beberapa perusahaan serta lembaga komersial dan pemerintah memunculkan gagasan untuk

membentuk serikat pekerja mereka sendiri, yang eksklusif untuk individu pribumi dan tanpa kehadiran orang asing. Inisiasi konsep ini dipicu oleh kemajuan di sektor jasa dan perdagangan yang sedang berkembang, yang kemudian memotivasi pekerja pribumi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, termasuk kondisi kerja, kesehatan, keselamatan kerja, upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan. Namun demikian, upaya-upaya ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena para pekerja secara konsisten terhalang oleh atasan mereka sejak awal, melalui tindakan seperti memperpanjang jam kerja dan mengabaikan hak-hak pekerja, sehingga menyulitkan upaya mereka untuk berserikat. Akibatnya, hubungan antara majikan dan karyawan selama era kolonial ini bersifat antagonis, karena majikan menolak untuk berpartisipasi dalam perundingan bersama.

Pendirian Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908 menandai awal gerakan nasionalis di Indonesia (Prabowo 2019). BO adalah organisasi pertama di Indonesia yang disusun dalam format modern. Mereka berfungsi di bidang pendidikan dan budaya, didirikan oleh mahasiswa institusi kedokteran STOVIA. Organisasi ini sangat aristokratik dan menarik anggotanya dari kalangan atas dan menengah masyarakat Jawa. Pendirian mereka didasarkan pada perspektif kritis terhadap praktik pemerintahan kolonial, bersamaan dengan inisiatif pendidikan untuk aristokrasi. Pada akhir tahun 1911, H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian berganti nama menjadi Serikat Islam (SI) untuk mempromosikan perdagangan lokal dan pengembangan ekonomi. Berbeda dengan BO, yang berfokus pada priyayi, gerakan SI bertujuan untuk menarik pengikut dari masyarakat umum, termasuk desa-desa, pedagang kecil, pendidik Islam, dan nelayan, tanpa membatasi upaya mereka hanya pada lingkaran kepemimpinan.

Penghargaan dari masyarakat pada waktu itu membuat pihak kolonial terkejut dan menganggapnya sebagai gangguan, atau lebih tepatnya, sebuah bahaya. Di komunitas kecil, priyayi baru dari kalangan menengah ini memiliki otoritas yang signifikan, memudahkan akses mereka ke informasi dan memungkinkan mereka berfungsi sebagai alternatif terbatas bagi pejabat pemerintah. Secara bersamaan, di tingkat yang lebih tinggi, para intelektual perkotaan yang lebih radikal secara terbuka menolak otoritas moral, sosial, dan politik dari administrasi kolonial. Kebangkitan kedua gerakan nasionalis ini secara signifikan mempengaruhi ekspansi dan evolusi gerakan SP.

Selanjutnya, lebih banyak SP muncul, termasuk Perkumpulan Bumiputera Pabean (PBPP) pada tahun 1911, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) pada tahun 1914, Serikat Pekerja Perusahaan Partikelir (SPPP) pada tahun 1915, Opium Regie Bond (ORB) pada tahun 1916, SP Pabrik Gula pada tahun 1917, antara lain. Era tersebut ditandai dengan penggabungan antara pegawai pemerintah dengan pekerja sektor swasta dan integrasi pekerja Eropa dengan pekerja lokal. Organisasi buruh berasal dari Kongres Nasional IV Serikat Islam (SI) di Surabaya pada tahun 1912, dengan keterlibatan

tokoh-tokoh Marxis seperti Alimin, Semaoen, dan Soerjopranoto. Sebuah federasi buruh bernama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) didirikan pada tahun 1919 dari pertemuan tersebut. Dalam agenda utamanya, PPKB menetapkan negara sebagai pelaksana arahan masyarakat dan bertujuan untuk mengkonsolidasikan tenaga kerja guna mengubah keadaan mereka (Sutherland 1983, 114).

Kemudian, munculnya Orde Baru dan kebijakan ekonomi 'pintu terbuka' menandai awal mula kelas menengah di Indonesia. Kebangkitan kelas menengah mendorong pengakuan luas terhadap pandangan bersama tentang keberadaan kelas menengah yang kuat, yang secara kausal dan konstruktif terkait dengan kemajuan demokrasi di suatu negara. Apa alasan di balik perkembangan ekonomi dan kemajuan suatu negara menuju status pendapatan menengah yang mendorong demokratisasi? Samuel P. Huntington (1927) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dan industrialisasi mendorong pertumbuhan kelas menengah. Akibatnya, persentase populasi yang terlibat dalam profesi seperti pengusaha, pemilik usaha kecil, pendidik, pegawai negeri sipil, manajer, teknisi, karyawan, dan pekerja sektor jasa telah meningkat secara bertahap. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa gerakan demokratisasi gelombang ketiga dipimpin oleh kelas menengah perkotaan daripada tuan tanah, petani, atau pekerja industri (Kirom 2013).

Kondisi Politik Indonesia Pasca-Reformasi

Pasca reformasi (orde baru) stabilitas politik di Indonesia mulai tergoyahkan dengan adanya populisme. Sejak pemilihan umum 2014, Indonesia telah menyaksikan peningkatan politik populis, dimulai dengan kampanye presiden Prabowo Subianto. Selama periode pemilihan tersebut, Prabowo Subianto mengadopsi strategi populis ultra-nasionalis, sementara rival politiknya, Joko Widodo, menerapkan pendekatan populis yang lebih pragmatis dengan lebih halus. Salah satu contoh inisiatif Jokowi selama periode tersebut adalah keterlibatannya dengan masyarakat melalui kunjungan yang disebut *blusukan*, di mana ia dengan seksama mendengarkan berbagai keluhan dan memberikan solusi langsung dengan memanfaatkan teknologi serta menjaga sikap yang tidak konfrontatif. Berlawanan dengan gambaran Jokowi sebagai individu yang tidak berpura-pura, Prabowo menyajikan narasi yang berfokus pada memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengkritik inisiatif atau keputusan pemerintah yang dianggap merugikan kekuatan Indonesia. Populisme semacam ini, menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk bergantung pada karakteristik otoriter dari seorang pemimpin atau tokoh politik, di mana populisme berfungsi sebagai instrumen serbaguna untuk menjamin bahwa, meskipun aktor tersebut mewakili rakyat, keuntungan tetap dapat diamankan. (Nur Budiman et al. 2022).

Kandidat populis yang memanfaatkan keadaan katastropik akan secara otomatis menyajikan narasi yang menekankan kondisi suboptimal dalam masyarakat, termasuk

penindasan yang meluas, ketidakadilan, dan marginalisasi kelompok identitas tertentu. Jika kandidat telah berhasil menciptakan lingkungan yang negatif dan tidak menguntungkan, fokus selanjutnya akan pada menekankan keterampilan dan keunggulan mereka dibandingkan dengan pesaing lainnya. Kandidat ini akan merumuskan identitas politik mereka sebagai 'perwakilan suara rakyat' (Seringkali dari kelas menengah ke bawah) dengan mengartikulasikan narasi konfrontatif untuk mengecam dan menolak norma atau praktik, seperti kapitalisme atau oligarki, yang dianggap sebagai penyebab utama masalah sosial.

Tidak hanya berhenti sampai pada kondisi populisme *yang laku* saja, bahwa kondisi politik pasca reformasi, diwarnai dengan ciri *politik identitas* yang sangat ramai diperbincangkan beberapa tahun silam, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta 2019. Maksud daripada politik identitas adalah ketika segala variabel yang mendefinisikan suatu masyarakat luas, digunakan oleh para tokoh-tokoh politik untuk kepentingan politiknya, dengan pembawaan narasi yang unik atau kreatif—dalil agama, nilai-nilai kebenaran, berpatok pada moral dan lain sebagainya (Kushendrawati 2006a). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam terbesar dan juga dengan mayoritas posisi ekonomi dikuasi oleh kelas menengah, maka sudah tentu bila populisme yang bernuansa nilai-nilai keislaman akan semakin mendapat *panggung* yang megah (Raharjo Jati, n.d.).

Kemudian, dengan menurunnya jumlah partisipasi politik dalam Pilkada di tahun 2024, menunjukkan bahwa iklim politik di Indonesia kian hari kian menjemukan. Tidak heran, jika dalam beberapa debat calon pemimpin daerah, kebanyakan yang ditunjukkan oleh mereka bukan gagasan substansial dan pembuktian kecakapan dalam memimpin, melainkan sekedar *gimmick* dan meningkatkan popularitas belaka. Turunnya tingkat partisipasi politik, merupakan masalah serius bagi demokrasi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena, rendahnya kepedulian dan partisipasi publik menyebabkan otoritas untuk menyalahgunakan sumber daya milik publik dan menjalankan agenda-agenda kebijakan yang diskriminatif serta stagnasi politik dan kekuasaan dalam arti negatif, yaitu stagnasi politik yang dapat berujung pada pemerintahan yang otoriter (Baca: Tidak memihak rakyat) (Hapsari et al. 2022).

Antara Politik dan Kapitalisme

Globalisasi telah menjebak umat manusia dalam daya tarik kapitalisme global, sebuah sistem yang menyediakan berbagai kenyamanan, daya tarik estetis, dan pemuasan keinginan secara instan (Kushendrawati 2006a). Penyatuan segala unsur ruang dan waktu, dalam satu sistem bernama *algoritma media sosial*, telah memerangkap baik secara budaya dan kehidupan sehari-hari tanpa ada sekat dan hambatan. Karena kapitalisme sudah tentu *profit oriented*, maka perkembangan kapitalisme global memerlukan keberadaan masyarakat konsumen yang akan menjadi target pasar atau

dalam istilah para marxis disebut 'sapi perah'. Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang keberadaannya didefinisikan secara eksklusif oleh diferensiasi barang-barang yang dikonsumsi. Masyarakat konsumen, yang dicirikan oleh budayanya yang mengutamakan konsumsi, memandang tujuannya dan keseluruhan keberadaannya melalui lensa konsumsi (Khiyaroh 2021). Hidupnya, semata-mata mengabdikan diri pada suatu simbol yang diatur oleh kapitalisme dalam penandaan dan jaringan iklan media sosial. Dalam kondisi yang seperti ini, keberadaan dirinya dan keberadaan orang lain akan dinilai dan diakui berdasarkan kriteria status sosial yang mereka pertahankan. Pengaruh media massa, terutama melalui inisiatif periklanannya, sangat massif—misal *Apple BMW*, bernuansa mewah. Pola konsumsi yang dipengaruhi oleh iklan dalam kapitalisme global jelas telah membentuk masyarakat konsumen yang berfungsi sebagai 'sapi perah' bagi para kapitalis.

Buku yang berjudul *Doing Cultural Studies: The Stories of the Sony Walkman* (1997), karya Stuart Hall, meneliti perkembangan historis kritik terhadap budaya konsumen di dalam masyarakat. Dasar yang dikemukakan adalah konsumsi sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat, yang mengakibatkan keterasingan individu dari kehidupan sosial yang lebih autentik; mengungkapkan pula bahwa sebagian besar konsumen berpartisipasi dalam kegiatan konsumsi terutama untuk memastikan identitas diri mereka. Jika kita meninjau kembali gagasan perbedaan sosial yang awalnya diungkapkan oleh Thorstein Veblen, dengan menegaskan bahwa terlepas dari status keuangan individu, perilaku pembelian mereka tidak hanya menghasilkan *nilai utilitarian* tetapi juga *nilai identitas*. Dalam hal ini, tolok ukurnya adalah kecenderungan status sosial yang berlaku.

Jean Baudrillard memperkuat gagasan konsumsi dengan mengaitkannya dengan kapitalisme global dan media massa, yang terus-menerus menghasilkan dan menyebarkan tanda-tanda untuk masyarakat konsumen berinteraksi. Menurut Baudrillard, konsumsi diubah menjadi konsumsi tanda-tanda indikasi. Dia menegaskan bahwa masyarakat konsumen tidak lagi terikat oleh moral dan adat istiadat yang telah dipegang teguh sejauh ini. Mereka saat ini mendiami sebuah peradaban baru yang memandang keberadaan mereka melalui jumlah tanda yang dikonsumsi. Dalam budaya seperti itu, konsumsi dipersepsikan bukan sebagai penghabisan objek, tetapi sebagai dinamika relasional antara objek atau sebagai upaya sistematis untuk mengelolanya. (Kushendrawati 2006b).

Selain daripada globalisasi dalam ranah ekonomi, efek dari globalisasi pun masuk ke dalam ranah pendidikan. Maksud dari globalisasi Pendidikan adalah Ketika pendidikan dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara lain, khususnya secara ekonomi. Sehingga, pada akhirnya Pendidikan tidak heran dipandang sebagai *pabrik-pabrik* yang memproduksi *manusia*. Hal ini, bisa kita saksikan dari kebijakan Menteri Pendidikan Indonesia era Presiden Jokowi, yaitu

Nadiem Makarim; kebijakan kampus Merdeka mahasiswa hanya dicetak untuk menjadi tenaga-tenaga penopang kapitalisme. Tidak heran, apabila tingkat partisipasi politik yang kian hari kian menurun. Sebab posisi daripada kaderisasi partai politik sudah menjadi sulit untuk dilaksanakan (Ardiyanti and Zulian, n.d.). Mengingat yang menjadi *trend* dari era sekarang ini adalah mengonsumsi *barang-barang kapitalistik* dan sama sekali bukan mengonsumsi ideologi.

Dari sini, bisa kita lihat suatu benang merah antara kapitalisme dan politik. Dimana kapitalisme membutuhkan suatu regulasi-regulasi yang memekarkan dan menguatkan dirinya, yakni tentu dari *instrumen negara* atau politik. Sekaligus kapitalisme membutuhkan masyarakat sebagai target pasar, untuk membantu mengembangbiakkan dirinya. Tidak heran, jika kita melihat posisi kelas menengah sekarang sebagai target yang benar strategis, baik dari lensa politik atau lensa ekonomi sekalipun; kelas menengah diterpa oleh narasi populisme dari kalangan orang-orang politikus, dan diterjang konsumerisasi oleh para kapitalis. Sehingga, kita bisa mengerti sekarang mengapa apatisisme dalam politik kian hari kian terasa, kini kampus tidak lagi menyuarakan ide-ide perlawanan dan narasi alternatif, melainkan lebih banyak mempertanyakan tentang kesempatan kerja, jejaring lowongan yang konkrit.

Contoh lain, kita bisa lihat secara sederhana dalam dunia sehari-hari bagaimana seseorang dibentuk oleh iklan-iklan yang bertebaran di dunia sosial. Semisal, seseorang yang menggunakan *apple* dianggap menyandang status sosial yang lebih tinggi; menjadikan kebanyakan orang-orang bekerja dan berusaha semata-mata untuk mengejar apa-apa yang dianggapnya *secara sadar* memberikan dampak status sosial. Dari sini, lambat laun akan mengafirmasi dalam kesadarannya bahwa hidup merupakan perjuangan untuk mempertahankan dan meninggikan status dirinya dalam kehidupan sosial; lambat laun akan membenarkan bahwa hidup memungkinkan untuk berkompetisi dengan yang lain semata-mata untuk status sosial dirinya sendiri terlebih dahulu; lambat laun akan terciptalah paradigma individualisme sebagai syarat awal legitimasi kapitalisme dalam dirinya. Individualisme lah yang membuat individu satu saling mengasingkan diri dengan individu yang lain; melemahkan solidaritas kepurbaan mereka. Pengejarannya kepada sesuatu yang dianggap akan membawa efek pada status sosial, merupakan langkah awal dalam menjadikan mereka *pasif* terhadap realitas sosial; yang akan berujung terhadap pasif secara dinamika politik—sejauh politik tidak meninggikan derajat sosialnya. Jika sudah ada pada tahap yang demikian, ia tidak akan sadar bahwa ia sudah diduduki alam pikirannya oleh rezim kapitalisme, pun ia tidak akan sadar bahwa kapitalisme telah memengaruhinya dalam bagaimana cara berpikir dan berperilaku.

Kapitalisme dan Kesadaran

Antonio Gramsci (1891) seorang filsuf dari Italia yang dipengaruhi oleh Karl Marx, mengadopsi pandangan *materialisme dialektis*, yang dapat menjelaskan mengapa politik kelas menengah di era kontemporer kian meredup. Baik Marx maupun Gramsci berusaha menyoroti dimensi material dan pragmatis dari usaha manusia, sambil juga

mempertahankan bagian dinamis dari idealisme, khususnya pengaruh kesadaran manusia dalam membentuk kembali alam dan masyarakat. Marx dan Gramsci menghindari posisi yang sekadar pasif, berbeda dengan pemikir idealis yang tetap berada pada tingkat abstrak dalam teori mereka dan gagal mengaktualisasikan teori mereka dalam keadaan konkret. Sementara Marx memprioritaskan materialisme, Gramsci menekankan idealisme. Gramsci menegaskan bahwa masyarakat harus memahami konteks ekonomi, politik, dan militer sebelum memulai gerakan yang sia-sia (Siswati 2018). Kondisi sosial para era Marx dan Gramsci, pengharusan membentuk aliansi kelas pekerja menjadi urgensi untuk melawan struktur kapitalisme. Kelas pekerja, terlepas dari pentingnya sikap otonom, diberi tugas untuk membangun tatanan borjuasi konstitusional, yang memerlukan penyediaan alat-alat yang diperlukan bagi kelas pekerja. Dinamika politik dan arena politik untuk kemudian berjuang demi hegemoni masa depan.

Antonio Gramsci, mencetuskan suatu konsep yang terkenal dengan istilah *hegemoni*. Hegemoni, merujuk pada konsep yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berjalan secara keras atau *koersif*, melainkan dengan kesepakatan atau *persuasif* (Siswati, n.d.). Sehingga, apabila kita masuk ke dalam pemikiran Gramsci, hegemoni bisa dilakukan dengan cara apapun yang sangat unik, termasuk dengan doktrin ideologi sekalipun. Semisal, kita mungkin cukup sering mendengar tentang kenapa *branding* diri merupakan poin kunci yang dilakukan oleh *public figure* untuk mendapatkan popularitasnya. Istilah *branding*, merupakan upaya untuk menjait status sosial ke dalam medan simbolik yang dianggap mapan. Sehingga, baik-buruk atau benar-salah dibiarkan oleh simbol yang dicitrakannya. Masalahnya adalah bahwa masyarakat konsumsi sebagaimana yang dijelaskan di penjelasannya sebelumnya, terfokus pada pengonsumsi terhadap simbol. Hal ini, termasuk ke dalam konstruk politik sekalipun, dimana kontestasi Pemilu 2024, Prabowo Subianto dengan karir militer yang tinggi juga menjadi buah bibir karena dicap sebagai pelaku kejahatan HAM, berhasil membangun citra lain kepada masyarakat bahwa dirinya adalah 'gemoy'.

Fenomena tersebut dalam teori Gramsci mengenai hegemoni, bahwa persetujuan merupakan syarat mutlak dalam mengendalikan atau menguasai suatu masyarakat. Jika masyarakat dibuat setuju apabila Prabowo adalah 'gemoy', maka Prabowo secara substansial akan bergeser menjadi gemoy tanpa memedulikan rekam jejak militeristiknya. Akan tetapi, mengapa masyarakat seakan dengan mudah melakukan persetujuan dalam psikis atau kesadarannya? Selain karena penggunaan media yang massif dicekoki oleh algoritma secara terus menerus, lalu pada akhirnya menyasar pada ranah sugesti. Gramsci merumuskan mengapa persetujuan bisa terjadi: 1) kecemasan akan terusir atau terasing dari arus sosial dalam istilah hari ini adalah *fomo*, 2) pembentukan *habbit* yang secara terorganisir dan terus menerus sehingga langsung melekat di alam bawah sadar. 3) hal-hal lain yang dilakukan secara inisiatif dan strategik (Siswati, n.d.).

Dari sini, sudah tergambar secara jelas apa gerangan yang membuat politik kelas menengah kian meredup. Bertambahnya jumlah Angkatan kerja dengan tidak diimbangi bertambahnya lowongan kerja, membuat posisi kelas menengah semakin terhimpit oleh faktor ekonomi. Alhasil, penanaman-penanaman doktrin kapitalisme yang individualistis dan apolitis menjadi semakin tidak ada semacam *barrier* diantara keduanya. Kelas menengah seakan mencari aman sembari terus mencari peluang untuk menghidupi dirinya. Sulit bagi kita membayangkan para *gen-z* berdemonstrasi secara berdarah-darah seperti yang Sudha terjadi dimasa-masa silam—selain caa tersebut sudah tidak relevan, cara tersebut pun mengancam kedudukan mereka dalam status sosial. Sehingga, sulit untuk melahirkan tokoh-tokoh yang memantik kesadaran para kelas menenga. Padahal, keterkaitan antara bab intelektual secara organik dan kelas (Menengah) adalah proses yang seharusnya dialektis: mereka menghasilkan atau memanifestasikan bentuk-bentuk pengalaman kelas pekerja sambil secara bersamaan mengembangkan kesadaran teoretis di dalam diri mereka. (Hutagalung Daniel 2004).

SIMPULAN

Kapitalisme modern telah menciptakan masyarakat konsumen yang mendasarkan identitas sosialnya pada pola konsumsi. Globalisasi sebagai penggerak utama fenomena ini membawa dampak ganda: di satu sisi, ia mendorong kemajuan teknologi dan pendidikan, tetapi di sisi lain, melemahkan solidaritas sosial melalui dominasi kapitalisme. Di Indonesia, kelas menengah memiliki posisi sebagai penghubung antara elit dan massa. Namun, alih-alih menjadi motor perubahan, mereka sering kali terjebak dalam apatisisme politik. Hal ini terjadi karena dominasi kapitalisme yang memanfaatkan budaya konsumen, pendidikan, dan media untuk mengarahkan kesadaran masyarakat ke arah kepentingan individual. Dalam dinamika politik kontemporer, tren populisme di Indonesia mencerminkan krisis narasi politik. Retorika populisme berbasis nasionalisme dan identitas budaya sering kali dimanfaatkan elit politik untuk mempertahankan status quo, sementara keterlibatan kelas menengah dalam politik tetap bersifat sporadis dan pragmatis.

Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni memberikan kita suatu gambaran untuk memahami fenomena ini. Gramsci menjelaskan bahwa kekuatan dominasi tidak hanya dicapai melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan masyarakat yang dibentuk oleh budaya dan institusi. Di Indonesia, hegemoni kapitalisme terlihat dalam bagaimana budaya konsumsi, pendidikan, dan media berhasil mengarahkan kesadaran kolektif kelas menengah. Kelas ini, meskipun memiliki potensi besar untuk perubahan, lebih sering terjebak dalam narasi kapitalisme yang menjanjikan stabilitas dan keamanan. Tanpa kesadaran kolektif yang terorganisir, mereka cenderung mempertahankan struktur yang ada daripada menantanginya. Namun, resistensi terhadap hegemoni kapitalisme bukanlah hal yang mustahil. Narasi alternatif dapat

menjadi alat penting untuk melawan dominasi ini. Gerakan reformasi 1998, misalnya, menunjukkan bagaimana solidaritas moral dan intelektual dapat membangun kesadaran kolektif yang efektif untuk melawan ketidakadilan. Selain itu, kontra-budaya populer melalui seni independen, media kritis, dan gerakan komunitas juga memiliki potensi untuk menjadi ruang resistensi terhadap hegemoni kapitalisme. Keberhasilan narasi alternatif ini sangat bergantung pada peran intelektual organik yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat kecil dan menjembatani mereka dengan kelas menengah. Di tengah situasi ini, kelas menengah Indonesia berada di persimpangan sejarah.

Apabila mereka terus berada dalam kondisi apatis, mereka akan tetap menjadi instrumen kapitalisme dalam mempertahankan status quo. Untuk itu, diperlukan upaya membangun kesadaran yang kritis dalam penekanan nilai solidaritas dan keadilan sosial. Pendidikan kritis dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam gerakan sosial. Selain itu, pembangunan narasi politik yang berkorelasi dengan kondisi masyarakat kontemporer, didukung oleh intelektual yang mampu menyatukan kepentingan rakyat dan kelas menengah pun harus selalu diperjuangkan. Dengan langkah-langkah ini, tentu kelas menengah dapat bertransformasi dari pendukung status quo menjadi penggerak utama perubahan sosial, sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan demokratis di tengah kapitalisme global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Dwi, and Ibnu Zulian. n.d. "KORELASI IDENTIFIKASI APATISME POLITIK DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK KOTA MEDAN."
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "KELAS MENENGAH SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN: TELAHAH PERSPEKTIF WEBBER," 6.
- Cuk, Oleh :, and Ananta Wijaya. n.d. "FILSAFAT EKONOMI ADAM SMITH."
<http://www.econ.lib>.
- Fansuri, Hamzah. 2017. "Konsumerisme Dan Hegemoni Barat Terhadap Masyarakat Negara Berkembang: Perspektif Antonio Gramsci." *Journal of Integrative International Relations* 3 (2): 33–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4891745>.
- Hapsari, Murti Ayu, Sri Handayani Retna Wardhani, Nita Ariyani, and Devi Andani. 2022. "Bahaya Apatisme Pemuda Terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2 (2): 105–17. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15180>.
- Haryanto. 2017. *Elit, Massa, Dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Hutagalung Daniel. 2004. "Hegemoni, Kekuasaan Dan Ideologi." *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia* 12 (12): 1–17.

- Khiyaroh, Intihaul. 2021. "Analisis Masyarakat Konsumsi: Komodifikasi Jomblo Melalui Speed Dating." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5 (1): 77–84. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i1.856>.
- Kirom, Sazali. 2013. "DINAMIKA PERKEMBANGAN GERAKAN SERIKAT PEKERJA DI INDONESIA (MASA KOLONIAL – ORDE LAMA) Sazalil Kirom." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1 (1).
- Kuntowijoyo. 2013. *Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa*. Yogyakarta: Ombak.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006a. "MASYARAKAT KONSUMEN SEBAGAI CIPTAAN KAPITALISME GLOBAL: FENOMENA BUDAYA DALAM REALITAS SOSIAL." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 10 (2): 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v10i2.19>.
- . 2006b. "Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 10 (2): 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v10i2.19>.
- Mawaddah, Ruth Grace Lumbantoruan, Hertati Sitanggang, Suci Larasati, Tengku Riza Valefi, Joyanti Sirait, Brena Rizky, and Flores Tanjung. 2024. "Perkembangan Koloni Inggris Di Amerika Dan Terjadinya Revolusi Amerika Dari Kemenangan Kesusilaan." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (6): 156–61. <https://doi.org/10.62504/jimr558>.
- Namang, Raimundus Bulet. n.d. "NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES."
- Nur Budiman, Bachtiar, Bella Dewi Safitri, Balilah Rizki Putriga, and Vinona Julietta Imanuella Wicaksono. 2022. "Populisme: Konsekuensi Dari Stagnasi Politik Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal PolGov* 4 (1): 211–43. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>.
- Wasisto Raharjo Jati. 2016. "Kelas Menengah Dalam Bingkai Middle Indonesia." *Jurnal Politik* 1 (2). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.1125>.
- Prabowo, Recharodus Deaz. 2019. "PEMIKIRAN MODERNISASI EKONOMI BUMIPUTRA DALAM SURAT KABAR BOEDI OETOMO DAN SOEARA MOEHAMMADIJAH DI HINDIA BELANDA (1920-1928)." *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 3 (1): 33–54. <https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.55>.
- Raharjo Jati, Wasisto. n.d. "MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK KELAS MENENGAH MUSLIM INDONESIA." <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.2.375-400>.
- Saefulloh Fatah, Eep. 1998. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswati, Endah. 2018. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5 (1): 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- . n.d. "ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI."
- Soebantardjo. n.d. *Sari Sejarah: Eropa-Amerika*. Jogjakarta: Bopkri.
- Sutherland, Heather. 1983. *Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi, Jakrta: Sinar Harapan, 1983, Hal. 114*. Jakarta: Sinar Harapan.